



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kerja Sama KKP RI-FAO dalam Implementasi
Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dengan Studi Kasus
The Lombok Blue Economy Implementation Program

Skripsi

Oleh

Adriana Anjani

2014330112

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kerja Sama KKP RI-FAO dalam Implementasi
Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dengan Studi Kasus
The Lombok Blue Economy Implementation Program

Skripsi

Oleh

Adriana Anjani

2014330112

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kerja Sama KKP RI-FAO dalam Implementasi
Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dengan Studi Kasus
The Lombok Blue Economy Implementation Program

Skripsi

Oleh

Adriana Anjani

2014330112

Pembimbing

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Adriana Anjani
Nomor Pokok : 2014330112
Judul : Kerja Sama KKP RI-FAO dalam Implementasi Kebijakan
Ekonomi Biru Indonesia dengan Studi Kasus *The Lombok
Blue Economy Implementation Program*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 10 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

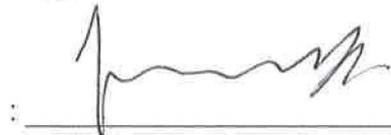
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, MPM., Ph.D.



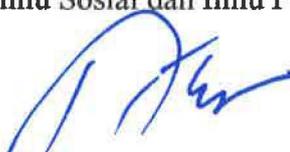
Sekretaris
Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.



Anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adriana Anjani

NPM : 2014330112

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kerja Sama KKP RI-FAO dalam Implementasi
Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dengan Studi
Kasus *The Lombok Blue Economy Implementation
Program*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Januari 2018



Adriana Anjani

ABSTRAK

Nama : Adriana Anjani
NPM : 2014330112
Judul : Kerja Sama KKP RI-FAO dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dengan Studi Kasus *The Lombok Blue Economy Implementation Program*

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya dan potensi maritim. Sumber daya dan potensi tersebut apabila dikembangkan secara optimal, maka industri maritim dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir Indonesia. Kebijakan nasional berbasis ekonomi biru merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut secara integratif, Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan aktor internasional. Penelitian ini membahas kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) dengan *Food and Agriculture Organizations of the United Nations* (FAO) untuk berkolaborasi dalam studi kasus program *The Lombok Blue Economy Implementation Program* yang dilaksanakan selama tahun 2014-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kerja sama yang terjadi antara KKP RI-FAO menggunakan teori fungsionalisme David Mitrany. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana kerja sama tersebut memiliki dampak pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Penelitian menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh KKP RI-FAO telah berlangsung fungsional, namun peranan dominan tetap dipegang oleh pihak KKP RI. Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi biru dijalankan dengan baik tetapi terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran penerapan konsep ekonomi biru secara integratif di Lombok, seperti ketersediaan teknologi dan modal. Kendala tersebut sebaiknya diantisipasi oleh pemerintah Indonesia apabila pemerintah ingin menerapkan kebijakan ekonomi biru di wilayah Indonesia lainnya di masa depan. Pendampingan dan pengawasan terhadap program kerja sama sangat penting terutama dari berbagai pihak terkait untuk menjamin transparansi dan membawa manfaat bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Kerja Sama KKP RI-FAO, *The Lombok Blue Economy Implementation Program*.

ABSTRACT

Name : Adriana Anjani
NPM : 2014330112
Title : The Cooperation of KKP RI-FAO in Implementing Indonesian Blue Economy Policy with Study Case of *The Lombok Blue Economy Implementation Program*

Indonesia is an archipelagic state rich in maritime resources and potentials. If the resources and potentials is managed optimally, the maritime industry can develop substantially and generate benefits for the society, especially coastal communities of Indonesia. Indonesian national policy based on blue economy is a new thing for Indonesia. In order to implement the policy integratively, Indonesia needs to cooperate with international actors. This research focuses on cooperation between The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia (KKP-RI) and Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) using the case study of The Lombok Blue Economy Implementation Program implemented during 2014-2015. The purpose of this research is to analyze how the cooperation between KKP RI-FAO was implemented using functionalism theory by David Mitrany. In addition, this research also sees how the cooperation had impacts in economic, environmental, and social aspects of the people of Lombok Tengah and Lombok Timur district. This research concludes that the cooperation managed by KKP RI and FAO was functional, but the dominant role is still held by KKP RI. Furthermore, the blue economic principles has been well implemented although there are some obstacles that hamper the implementation of an integrative blue economy concept in Lombok, such as the availability of technology and capital. These obstacles should be anticipated by the government if the government plans to implement blue economic policies in other parts of Indonesia in the future. Lastly, the assistance and supervision from various stakeholders on the program is also very essential to ensure transparency and to bring benefits to the local community.

Keywords: Blue Economy, KKP RI-FAO Cooperation, *The Lombok Blue Economy Implementation Program*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian berjudul **Kerja Sama KKP RI-FAO dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dengan Studi Kasus *The Lombok Blue Economy Implementation Program*** ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Secara umum, penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia dengan mengambil studi kasus *The Lombok Blue Economy Implementation Program* sebagai hasil kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan *Food and Agriculture Organizations of the United Nations* (FAO). Penelitian ini akan membahas bagaimana kerja sama antara dua pihak ini dilakukan, lalu bagaimana dampaknya secara ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur sebagai lokasi kerja sama. Untuk menjelaskan penelitian ini, Penulis menggunakan teori fungsionalisme David Mitrany dan konsep ekonomi biru dari Gunter Pauli.

Penulis berharap penelitian ini dapat membawa manfaat bagi berbagai bidang keilmuan dan menjadi pembelajaran untuk implementasi proyek serupa di kemudian hari. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun argumentasi sehingga mengharapkan saran, kritik, atau rekomendasi yang dapat menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata, Penulis berterima kasih kepada Bapak Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing Penulis dari awal hingga akhir penelitian.

Bandung, 19 Januari 2018

Adriana Anjani

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pembuatan skripsi ini, Penulis amat menyadari bahwa prosesnya tidak luput dari usaha, dukungan, doa, dan semangat dari orang-orang terdekat. Tanpa mereka, Penulis mungkin tidak akan bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Seandainya ada kata ucapan yang lebih tinggi dari terima kasih, maka Penulis sudah pasti akan menggunakannya untuk menghargai lebih keterlibatan mereka dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT.
2. Ayah dan Bunda. Terima kasih yang tidak terhingga aku sampaikan dalam doaku setiap hari untuk mengucap rasa syukur memiliki orang tua seperti Ayah dan Bunda yang selalu mendukung aku dalam setiap situasi. Terima kasih atas doa, materi, dan cinta yang luar biasa dari mendidik aku sejak kecil hingga aku bisa menyelesaikan studi sarjanaku.
3. Kakakku, Anggasta Anindityo. Seorang kakak, teman, sahabat, musuh, guru, dan sebentar lagi menjadi seorang Bapak. Terima kasih sudah banyak membantu dan mengajarkanku nilai-nilai kehidupan. Tanpa canda gurau bersamamu, hidupku amat sepi.
4. Semua doa dan dukungan yang berasal dari Nenek, Mami, Eyang, om, tante, sepupu, Kak Rara dan seluruh keluarga besar. Selain itu, inspirasi dan pelajaran hidup dari Alm. Papi dan keluarga yang sudah meninggalkan kami terlebih dahulu.

5. Sahabat-sahabatku selama di kuliah: Sabilla Hamami Robayana, Agatha Lydia Natania, Rheza Prawira Kusumah, Celica Andini, Alya Atila, Ayu Ammalia Pratiwi. Terima kasih banyak sudah berbagi pelajaran, pengalaman, cerita bahagia dan duka selama bangku kuliah. Terima kasih atas semua bantuan yang telah kalian lakukan pada saya.
6. Dosen-dosen HI Unpar yang sudah sangat menginspirasiku, baik dalam hal akademis maupun kehidupan sehari-hari. Sungguh jasa-jasa kalian tidak akan terlupa sampai kapanpun. Mas Apres, Mbak Sylvi, Mas Adri, Bang Tian, Mbak Mireille, Mas Sapta, Mas Nyoman, Mbak Anggi, Mas Idil, Mas Abe, Mas Gi, Alm. Mbak Diandra, Mas Ir, Mbak Anggun, dan lain-lain.
7. Teman-teman Inti dan Ring I HMPSIHI 2016/2017-ku yang aku sayangi: Antonius Reynaldo Giovanni, Saraswati Kartika Malta, Sherly Megaputri, Claudia Isabella, Andin, Andri, Zabrina Vicky, Annisa Laksmintari, Dhanny Kresnaputra, Yunas, Dargo, Aryo, Khalif, Tantra, Dika.
8. Keluarga KSMPMI 2015/2016 sebagai organisasi yang telah mengajarkan saya untuk tumbuh: Rizky Aji Pratama, Dyaning Pangestika, Togu Alexander, Feby, Farizi, Ivan, Grace Jessy.
9. Grup Sosialita: Awanisa Huwaini, Sarah Assegaf, Loran Pal Seo. Tidak lupa terima kasih juga untuk Ilham Fachri yang suka meramaikan suasana dan Shafira Amalia Hidayat yang sering menyemangati saya.
10. Sobat magang di KBRI Brunei yang selalu senasib dan sepenanggungan: Sarifa Rahma Pasaribu. Terima kasih banyak telah menjadi rekan perjalanan yang baik.

11. Sobat-sobat dekatku yang sudah menjadi tempat keluh kesah dan berbagi keceriaan selama di kuliah: Berlin, Upi, Nathaya, Bobby, Shasta, Ayu Caesar, Venti, Al, Abas, Reyhan, Owi, Amy, Ate, Aya, Aliya, Adam, Rifa, Ijal.
12. BG: Intan Dwinovita Hanum, Tria Mustika Ramadhani, Nabila Ghaisani, Marinda Yashinta, Adinda Farhana, Karina Aulia, dan Rachman Futhu. Terimakasih sudah menjadi *support system* yang baik dari jaman OSIS SMA sampai sekarang.
13. Teman-teman AFS @binabudbdg, terutama yang sudah datang saat saya sidang: Edo, Faisal, Dina. Ucapan lainnya juga untuk Kak Yoan, Kak Irin, Fianza Rezkita, Arika Mirah Kautsar, Arry, Febri, Farhana, Faisal, Efraim, Girin, MJ, Kak Ipiw, Teh Nami.
14. Sahabat TK/SD/SMP/seterusnya, yang walaupun sudah jarang bertemu tapi tali silaturahmi ini tidak akan putus: Alyana Hastipringgi Bigwanto, Luthfina Abbiya Hermawan, Vika Adika Putri, Dira, Salsa, Ayala.
15. Reizka Dwidianto. Sahabat, rekan WatchDocs, teman bermain, teman bercerita dan bersenda gurau akan banyak hal, dari hal yang penting sampai tidak penting. Orang teraneh se-HI Unpar 2014 tapi kemampuan dan kebaikannya tidak boleh diragukan.
16. Ai. Sahabat, teman baik, guru. Orang yang selalu memberikan semangat untuk saya dan meyakinkan saya kalau saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Terima kasih atas semua pelajaran hidup, cerita, dan kenangan selama ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR FIGUR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Pembatasan Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Tinjauan Pustaka	10
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	28
1.6.1 Metode Penelitian	28
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	29
1.7 Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II: RELASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (KKP RI) DENGAN <i>FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)</i>.....	32
2.1. Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.....	32
2.2. Profil <i>Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)</i> ..	37
2.3. Kerja Sama Umum antara KKP RI dan FAO	40

2.4. Kerja Sama Maritim antara KKP RI dan FAO	47
BAB III: ANALISIS KERJA SAMA KKP RI-FAO DAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA DALAM STUDI KASUS <i>THE LOMBOK BLUE ECONOMY IMPLEMENTATION PROGRAM</i>	55
3.1. Penggunaan Teori Fungsionalisme dalam Menganalisis Kerja Sama KKP RI dan FAO dalam bidang Ekonomi Biru	55
3.1.1. Prinsip Pertama: Tujuan Dominan dari Aktor Terlibat	57
3.1.2. Prinsip Kedua: Instrumen Kebijakan Negara.....	61
3.1.3. Prinsip Ketiga: Dorongan Pembuatan Agenda Kerja Sama.....	65
3.1.4. Prinsip Keempat: Peran Organisasi Internasional	69
3.2. Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Kerja Sama KKP RI-FAO <i>The Lombok Blue Economy Implementation Program</i>	73
3.2.1. Implementasi Aspek Ekonomi pada Masyarakat Lombok Timur melalui <i>The Lombok Blue Economy Implementation Program</i>	79
3.2.2. Implementasi Aspek Lingkungan pada Masyarakat Lombok Tengah melalui <i>The Lombok Blue Economy Implementation Program</i>	86
3.2.3. Implementasi Aspek Sosial pada Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah melalui <i>The Lombok Blue Economy Implementation Program</i>	90
BAB IV: KESIMPULAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	106
Lampiran 1	113

DAFTAR FIGUR

Figur 1.1.	Konsep Ekonomi Biru.....	24
Figur 1.2.	Kerangka Konsep Ekonomi Biru.....	26
Figur 1.3.	Matriks Penggunaan Teori Fungsionalisme dan Konsep Ekonomi Biru dalam Menganalisis Kerja Sama KKP RI-FAO.....	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Total Emisi Gas Kaca Global berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2014.....	22
Grafik 3.1.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lombok Timur Tahun 2013..	84
Grafik 3.2.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan Kepemilikan Usaha Budidaya Laut.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Prinsip Fundamental Teori Fungsionalisme.....	19
Tabel 3.1.	Konsumsi Ikan Tahun 2011-2015 (Kg/Kapita).....	58
Tabel 3.2.	Matriks Rencana Kerja antar Para Pemangku Kepentingan untuk Program <i>Blue Economy</i> di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.....	70
Tabel 3.3.	Kebutuhan Infrastruktur untuk Aktivitas Budidaya.....	83
Tabel 3.4.	Tabel Matriks Rencana Aksi untuk <i>Blue Economy</i> di Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan Program Kerja Sama Inter- Sektoral Bidang Sosial-Ekonomi.....	95

DAFTAR SINGKATAN

AHP	: <i>Analytic Hierarchy Process</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
CCRF	: <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
COFI	: <i>Committee on Fisheries</i>
CTI	: <i>Coral Triangle Initiative</i>
DPJB	: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>
GEF	: <i>Global Environment Facility</i>
IFRDMD	: <i>Inland Fishery Resources Development and Management Department</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMTA	: <i>Integrated Multi-Trophic Aquaculture</i>
INDES0	: <i>Infrastructure Development for Space Oceanography</i>
INTRACEN	: <i>International Trade Center</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
IPOA	: <i>International Plan of Action</i>
IUUF	: <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KSK	: Kawasan Strategis Kabupaten
LBB	: Liga Bangsa-Bangsa
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organizations</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTN	: Nilai Tukar Nelayan
NTUP	: Nilai Tukar Usaha Perikanan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
P3K	: Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PIJAR	: Pengembangan Sapi, Jagung, dan Rumput Laut
RI	: Republik Indonesia
RPJMPD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPOA	: <i>Regional Plan of Action</i>
RZWP-3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
SEAFDEC	: <i>Southeast Asian Fisheries Development Center</i>
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIDS	: <i>Small Island Developing States</i>
SK	: Surat Keputusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama

SSF	: <i>Small-Scale Fisheries</i>
SWOT	: <i>Strength Weakness Opportunity Threat</i>
TA	: <i>Technical Assistance</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNCLOS	: <i>United Nations of Convention on the Law of the Sea</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
ZEE	: <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Posisi geografis yang terletak sangat strategis di garis khatulistiwa merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia. Laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi kekayaan maritim negeri. Namun, sayangnya potensi yang dimiliki oleh perairan Indonesia sampai saat ini belum dioptimalkan. Masih banyak kasus kriminalitas dan pelanggaran yang terjadi di lautan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kriminalitas maritim di Indonesia, seperti kasus pembajakan 4 kapal milik Indonesia yang sangat merugikan pada kapal *Jakarta Tanker Anchorage*, *Balikipapan Inner Anchorage* dan *Samarinda Anchorage* tahun 2015.¹ Banyak pula kasus terkait *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) yang menghambat roda perekonomian maritim.

Keamanan dan pertahanan maritim Indonesia masih belum kuat sehingga keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak asing. Kejahatan maritim ini menyebabkan banyak kasus kapal asing ilegal mencuri sumber daya laut Indonesia tanpa izin yang jelas. Seperti pada awal tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menangkap 17 kapal perikanan asing yang ditangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau, dan perairan Sulawesi Utara. Kapal-

¹“ReCAAP: Asian Maritime Crimes at Lowest in Four Years”, *World Maritime News*, diakses Maret 7, 2017, <http://worldmaritimeneeds.com/archives/194417/recaap-asian-maritime-crimes-at-lowest-in-four-years/>.

kapal asing tersebut berasal dari Vietnam dan negara lainnya.² Selain itu, masih banyak lagi kasus-kasus kapal pencurian yang sangat merugikan negara. Maraknya kriminalitas maritim yang terjadi di Indonesia menunjukkan lemahnya pengawasan batas negara atau *border control* Indonesia, khususnya di wilayah perairan dan perbatasan.

Pada bulan Juni 2012, Presiden RI ke-6, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkesempatan menjelaskan konsep ekonomi biru dalam forum internasional melalui pidatonya di *Leaders Valuing Nature* sebagai salah satu mata acara *Rio+20*. SBY pun memaparkan konsep ekonomi biru sebagai konsep pembangunan yang mempromosikan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan lingkungan hidup.³ Dilanjutkan dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019, Jokowi menetapkan Sembilan Agenda Prioritas Indonesia yang dirangkum dalam Nawacita. Agenda tersebut berisi visi dan misi yang harus dicapai oleh Indonesia selama 5 tahun kepemimpinan beliau.

Visi pertama dalam Nawacita Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan keamanan dan kepentingan maritim, khususnya dalam bidang batas negara, kedaulatan maritim, dan pemanfaatan sumber daya.⁴ Lalu, visi ketiga dalam Nawacita yang mencantumkan bahwa pemerintahan Jokowi akan membangun

² “KKP Kembali Tangkap 17 Kapal Perikanan Asing”, *KKP News*, diakses Maret 26, 2017, <http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-kembali-tangkap-17-kapal-perikanan-asing/>.

³ ““Blue Economy” challenge for Indonesia”, *WWF Indonesia*, diakses Maret 27, 2017, <http://www.wwf.or.id/en/?26820/>.

⁴ “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi”, *Jokowi-Jusuf Kalla*, diakses Maret 26, 2017, http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, hlm. 7.

Indonesia dari daerah pinggiran dengan memperkuat pedesaan namun masih dalam kerangka kesatuan.⁵ Indonesia menetapkan dengan tegas ingin mengembangkan industri maritim secara signifikan, agar Indonesia bisa mandiri secara ekonomi. Hal tersebut menjadi strategi Jokowi untuk memprioritaskan pilar ekonomi sebagai diplomasi luar negeri Indonesia dalam mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional. Kemudian dalam *Press Statement* Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, beliau menekankan bahwa potensi diplomasi maritim Indonesia sangat besar dan sudah saatnya bagi Indonesia untuk bertindak tegas dalam menangani kasus perbatasan maritim negara dengan negara-negara tetangga.⁶ Apabila Indonesia semakin menegaskan batas dan teritori maritimnya, maka kejahatan IUUF bisa berkurang karena pelakunya ditindak secara hukum.

Kebijakan ekonomi Indonesia selama ini lebih condong mengandalkan konsep-konsep ekonomi hijau. Konsep tersebut adalah konsep ekonomi yang berorientasi pada hasil dan sumber daya yang berasal dari daratan seperti: perkebunan, pertanian, dan perhutanan. Sedangkan, konsep ekonomi biru adalah konsep yang mengacu pada orientasi pemanfaatan hasil dan kekayaan maritim. Ekonomi biru menekankan pada: proteksi, kesehatan, keamanan ekosistem dan komunitas maritim.⁷ Pada dasarnya, ekonomi hijau dan ekonomi biru merupakan konsep ekonomi yang memiliki pemikiran serupa, yaitu aktivitas ekonomi haruslah disertai dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Hanya saja, fokus dan orientasi

⁵ “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi”, *Jokowi-Jusuf Kalla*.

⁶ *Ibid.*

⁷ “Blue Economy for Business in East Asia: Towards an Integrated Understanding of Blue Economy”, *Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)*, November 2015, hlm. 28.

kedua kebijakan ini berbeda, apabila ekonomi hijau lebih mengarah pada pengurangan emisi karbon dari hasil polusi industri darat, maka ekonomi biru mengarah pada pemanfaatan maritim secara keseluruhan.

Selama ini, Indonesia masih terlalu terpaku pada pengembangan ekonomi hijau atau *green economy*. Pertanian dan perkebunan menjadi komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri. Padahal, hasil dari pertanian dan perkebunan sebetulnya masih memiliki banyak kekurangan yang harus diantisipasi untuk keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Produk hasil pertanian memiliki dampak buruk terhadap perubahan iklim yang lebih besar apabila dibandingkan dengan produk akuakultur karena produk akuakultur mengeluarkan lebih sedikit emisi nitrogen dan fosfor global per satuan berat.⁸

Ekonomi biru merupakan suatu konsep yang cocok diterapkan di negara kepulauan seperti Indonesia. Hal tersebut bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam merintis penerapan proyek-proyek berbasis ekonomi biru untuk kesejahteraan masyarakat daerah.⁹ Terbukti dari usulan-usulan Indonesia yang sering pertama kali mencetuskan konsep ekonomi biru sebagai solusi pembangunan, seperti dalam Forum *Rio+20*. Dalam forum tersebut, Indonesia menyatakan bahwa dominasi

⁸ “Laporan Investigasi Dampak Lingkungan Akuakultur; Budidaya Pangan Hasil Laut Berkelanjutan Menjadi Kunci Ketahanan Pangan Global Masa Depan”, *Conservation International*, diakses Maret 5, 2017, <http://www.conservation.org/NewsRoom/pressreleases/Pages/Laporan-Investigasi-Dampak-Lingkungan-Akuakultur.aspx>.

⁹ Herie Saksono, “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan. Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas”, *Jurnal Bina Praja Kementerian Dalam Negeri*, diakses Maret 7, 2017, <http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/view/82>.

kebijakan ekonomi hijau membuat kita terdistraksi dari potensi laut yang kita punya.¹⁰

Selain itu, pemaparan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berjudul “*Blue Growth: Indonesia Example*” dalam acara *Global Ocean Action Summit 2014, FAO Blue Growth Town Hall Meeting 2014, 30th FAO Committee on Fisheries Meeting 2014*, serta pada *3rd International Conference on Small Island Developing States (SIDS)* di Apia, Samoa, 1-4 September 2014 juga menginspirasi negara-negara kepulauan lainnya untuk lebih menggali potensi laut mereka.¹¹

Presiden Seychelles, James Alix Michel, menyambut dengan positif inisiatif Indonesia dalam mempromosikan konsep ekonomi biru pada *Blue Economy Summit* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.¹² Partisipasi aktif Indonesia dalam mengencarkan konsep ekonomi biru di dunia internasional mendorong Indonesia menjadi negara perintis penerapan proyek-proyek berbasis ekonomi biru. Indonesia pun semakin optimis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.¹³ Indonesia pun mulai gencar melaksanakan beberapa proyek pembangunan yang bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan. Proyek-proyek tersebut dijalankan guna membangkitkan kembali industri maritim di Indonesia. Salah satu program implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia yang paling

¹⁰ “The Blue Economy”, *The World Folio*, diakses Maret 26, 2017, <http://www.theworldfolio.com/news/blue-economy-indonesia-n1566/1566/>.

¹¹ “Blue Economy/Blue Growth Gagasan Indonesia Memukau FAO”, *Kementerian Kelautan dan Perikanan*, diakses Maret 5, 2017, http://pusluh.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1076/?category_id=.

¹² Indroyono Soesilo, “Blue Economy for Marine Resource Development”, *The Jakarta Post*, diakses Maret 26, 2017, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/20/blue-economy-marine-resource-development.html>.

¹³ Ibid.

besar adalah *The Lombok Blue Economy Implementation Program*, merupakan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dengan *Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)*. Program ini didominasi oleh peran aktor utama KKP RI dan FAO sebagai institusi internasional yang memberikan dukungan melalui pemberian dana, asistensi, dan pembuat laporan kajian pengadaan program tersebut yang kemudian mempengaruhi kebijakan KKP RI dalam memberi keputusan.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Pembatasan Masalah

The Lombok Blue Economy Implementation Program adalah suatu program pembangunan terintegrasi, yang dilaksanakan secara hulu dan hilir, serta diterapkan tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Program ini memiliki program dalam sektor: perikanan tuna, akuakultur, pariwisata bahari, industri garam, industri mutiara, program peningkatan kapasitas (*capacity building*), peningkatan infrastruktur dan energi ramah lingkungan berkelanjutan.¹⁴ Namun, industri yang menjadi fokus utamanya adalah budidaya rumput laut dan ikan kerapu di Lombok.¹⁵ Program implementasi ini juga ditargetkan dapat menciptakan 77.700 lapangan pekerjaan

¹⁴ Indroyono Soesilo, "Blue Economy for Marine Resource Development", *The Jakarta Post*, diakses Maret 26, 2017, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/20/blue-economy-marine-resource-development.html>.

¹⁵ "Pengembangan Rantai Nilai Perikanan Budidaya untuk Mendukung Program *Blue Economy* di Pulau Lombok", *Food and Agriculture Organizations of the United Nations*, Jakarta, 2017, hlm. xiv.

baru dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1.3 triliun per tahun.¹⁶ Pengerjaan program berlaku dari tahun 2014 sampai 2015.

Program ini menarik untuk diteliti karena sesuai dengan ambisi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan adanya faktor-faktor pendukung yang dapat menyukseskan kerja sama ini. Dengan adanya proyek tersebut, diharapkan target yang sudah dirancang dapat tercapai dengan baik sehingga pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat Lombok setempat. Apabila proyek ini berjalan dengan baik, maka diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menerapkannya di daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan begitu, kebijakan ekonomi biru yang menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia era Jokowi bisa terlaksana secara menyeluruh di wilayah Indonesia.

Penelitian ini akan terbagi menjadi dua fokus bahasan, yaitu mengenai analisis kerja sama pemerintah Indonesia melalui KKP dengan FAO dalam kebijakan berbasis ekonomi biru dan analisis implementasi konsep ekonomi biru dari proyek *The Lombok Blue Economy Implementation Program*. Proyek yang berlangsung dari 2014-2015 ini memiliki rancangan proyek yang sangat mendetail dan terencana. Target proyek ini bisa menyerap 77.000 pekerja dan meraih pendapatan Rp 1,3 trilliun per tahun.¹⁷ Pelaksanaan proyek tersebut tidak bisa optimal tanpa kerja sama yang baik antar pihak-pihak terkait.

¹⁶ “Pengembangan Rantai Nilai Perikanan Budidaya untuk Mendukung Program *Blue Economy* di Pulau Lombok”, *Food and Agriculture Organizations of the United Nations*, Jakarta, 2017, hlm. xiv.

¹⁷ “Focus on Maritime Sector”, *Nusantara Maritime News*, diakses Maret 5, 2017, <https://nusantamaritimeneews.id/focus-on-maritime-sector/>.

Lebih lanjut, penelitian ini akan meneliti berdasarkan 4 prinsip teori fungsionalisme David Mitrany, seperti apa saja tujuan dominan dari aktor terlibat, instrumen kebijakan negara, dorongan formasi agenda tersembunyi, dan peran organisasi internasional.¹⁸ Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana kerja sama KKP-FAO dalam menerapkan konsep ekonomi biru melalui *The Lombok Blue Economy Implementation Program* lalu menyesuaikan apakah rekomendasi kebijakan FAO sesuai target dan berdampak positif ke masyarakat setempat. Apabila proyek ini berlangsung sukses, maka proyek ini bisa dijadikan contoh model penerapan program serupa untuk daerah kepulauan lain di Indonesia yang masih belum dimanfaatkan dengan baik potensi sumber daya maritimnya dan mengantisipasi kendala-kendala yang akan dihadapi oleh wilayah prospektif selanjutnya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kerja sama yang dilakukan antara KKP dan FAO berlangsung fungsional dan dampaknya terhadap prinsip ekonomi biru dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan kebijakan ini, Indonesia melakukan kerja sama dengan pihak luar demi membangun masyarakat yang lebih baik. Efektivitas dan fungsionalitas program implementasi *The Lombok Blue Economy Implementation Program* sebagai proyek prioritas pencapaian visi maritim

¹⁸ Mihai Alexandrescu, "David Mitrany: From Federalism to Functionalism", *Transylvanian Review* XVI. 20-33: 2007.

Indonesia perlu diteliti apakah berpengaruh atau tidak sehingga penelitian ini akan berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan riset: **“Bagaimana kerja sama KKP RI-FAO dalam penerapan kebijakan ekonomi biru melalui *The Lombok Blue Economy Implementation Program* di Indonesia berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur?”**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis apakah kerja sama *The Lombok Blue Economy Implementation Program* yang dilakukan oleh KKP RI dan FAO sebagai salah satu program implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia itu fungsional, serta bagaimana dampaknya dilihat dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi terkait proyek implementasi pembangunan masyarakat Lombok melalui *The Lombok Blue Economy Implementation Program*. Adapun penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan FAO mengenai program pembangunan terkait ekonomi biru di masa depan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan buku *Konsep Blue Economy: Sumber Pertumbuhan Baru di Indonesia* yang ditulis oleh Dr. H. Ali Musa Pasaribu, letak geografis Indonesia yang sangat strategis merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia sendiri. Berkat posisi strategis ini, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang sangat kaya dan apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Berkat adanya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia kemudian diakui sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.500 pulau. Setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS tersebut, Indonesia mewujudkan kepentingan internasionalnya secara khusus di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa di perairan dan laut Indonesia, maka Indonesia sudah sebaiknya mengarah pada kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan berkelanjutan. Melihat fenomena potensi kekayaan sumber daya alam dan kondisi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) di Indonesia belum optimal pengelolaannya, ekonomi biru bisa menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan P3K yang baik oleh pemerintah Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat, hingga dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat pesisir itu sendiri. Namun sebelum mengelola wilayah-wilayah pesisir Indonesia, pengenalan dan kajian karakteristik

wilayah sangat penting untuk dilakukan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang komprehensif.¹⁹

Selama ini, kebijakan pemerintah dalam mengintervensi percepatan pembangunan ekonomi pulau-pulau kecil di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun badan yang mulai memperhatikan pengembangan ekonomi kreatif adalah Kementerian Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Padahal, pembangunan setiap pulau-pulau kecil di Indonesia merupakan peran setiap lembaga pemerintah untuk menjadi perhatian, sejauh adanya potensi pembangunan dari wilayah-wilayah tersebut. Pembangunan P3K Indonesia bukan merupakan pembangunan yang singkat dan dibutuhkan perencanaan pemerintah yang komprehensif ke depannya. Tidak menutup kemungkinan, bekerja sama dengan organisasi internasional atau negara lain pun dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan wilayah pesisir Indonesia.²⁰ Buku ini menjelaskan secara spesifik bagaimana implementasi kebijakan ekonomi biru mulai diterapkan perlahan-lahan oleh Indonesia di beberapa wilayah pesisir dengan melihat kendala serta peluang yang ada. Buku ini pun berusaha menjelaskan kegiatan-kegiatan sub sektor industri maritim dengan memperhitungkan hukum laut perairan Indonesia, namun lebih banyak memandang dari sisi sektor publik dan kurang melihat gambaran besar dari konsep ekonomi biru yang dicetuskan oleh Gunter Pauli sendiri.

¹⁹ Ali Musa Pasaribu, *Konsep Blue Economy: Sumber Pertumbuhan Baru di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), hlm. 113-114.

²⁰ Ibid., hlm. 7-30.

Untuk melengkapi literatur konsep ekonomi biru, ekonomi biru yang dicetuskan oleh Gunter Pauli melalui bukunya *The Blue Economy* menawarkan solusi baru dalam mengatasi isu lingkungan dan mendorong adanya inovasi-inovasi bisnis berbasis kemaritiman.²¹ Konsep ekonomi biru ini pun sesuai dengan pembangunan Indonesia yang ingin membangkitkan kembali ekonomi masyarakat pesisir. Berbeda dengan Inovasi bisnis berbasis maritim ini menentang stigma kapitalis yang berpikiran bahwa proses bisnis tidak harus mengorbankan lingkungan demi profit. Pembangunan yang ada haruslah berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.²²

The Blue Economy menawarkan kebijakan ekonomi biru sebagai suatu alternatif solusi pembangunan berkelanjutan yang bisa memberantas permasalahan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena lapangan pekerjaan tidak memadai. Dengan pengembangan dan inovasi-inovasi yang dilakukan sektor bisnis terkait kebijakan ekonomi biru, diharapkan aktivitas bisnisnya dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja. Pada akhirnya, diharapkan masalah pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi biru yang dicetuskan oleh Gunter Pauli yang menyatakan “*10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*”.

Penelitian Herie Saksono yang berjudul “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan. Studi Kasus Kabupaten Kepulauan

²¹ Gunter Pauli, *The Blue Economy*, (New Mexico: Paradigm Publications, 2010).

²² Ibid.

Anambas” terdapat dalam *Jurnal Bina Praja* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, merupakan penelitian yang membahas tentang potensi laut yang dimiliki oleh negara-negara kepulauan di dunia. Indonesia memiliki peluang akan hal ini, namun masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hal isu maritim. Tingkat kriminalitas maritim yang tinggi di Indonesia, menyebabkan negeri ini mengalami kerugian karena pencurian oleh negara asing. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia sudah merugi Rp 30 triliun. Angka ini bukan jumlah yang sedikit dan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia belum optimal.²³

Selama ini, pengelolaan potensi kelautan di daerah-daerah kepulauan di Indonesia belum didukung oleh inovasi yang memanfaatkan kearifan lokal dan masyarakat setempat. Selain itu, konsep ekonomi biru cocok untuk diterapkan di negara-negara kepulauan yang memiliki karakteristik budaya sendiri karena ekonomi biru menekankan pentingnya tata nilai dan cara berpikir yang baru. Ekonomi biru tidak boleh menempatkan alam sebagai objek. Namun dalam pemanfaatan sumber daya laut suatu negara, dibutuhkan partisipasi pemerintah dan organisasi internasional melalui kebijakan-kebijakan yang ada sehingga sumber daya tersebut dapat terkelola secara profesional dan benar untuk kesejahteraan masyarakat.²⁴

Penelitian Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi berjudul “Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru dengan Pendekatan

²³Herie Saksono, “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan. Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas,” hlm. 2.

²⁴ Ibid., hlm. 4.

Analytic Hierarchy Process (AHP)” menjelaskan tentang beberapa program pembangunan berbasis ekonomi biru yang sudah diterapkan di beberapa provinsi Indonesia, seperti Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumbawa. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan konsep ekonomi biru di lapangan selama bulan Maret-Oktober 2014 menggunakan analisis *Strength Weakness Opportunities Threat (SWOT)* dan pendekatan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan bahwa penerapan ekonomi biru harus dilengkapi dengan kebijakan kelautan dan perikanan yang integratif, serta mengandung aspek-aspek teknis seperti teknologi yang menunjang, peningkatan sumber daya manusia (SDM), sosialisasi konsepsi ekonomi biru kepada masyarakat setempat, dan penerapan budidaya perikanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi biru.

Lokasi penelitian dilakukan di 5 tempat Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya laut. Melalui pengumpulan data wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner terstruktur, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia harus disertai dengan kerangka kebijakan kelautan dan perikanan yang integratif. Kebijakan pembangunan budidaya perikanan juga harus sesuai dengan konsep ekonomi biru dan sebaiknya difokuskan pada peningkatan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan masyarakat secara seimbang. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keberagaman dan meningkatkan jumlah produk, dengan

memerhatikan perlindungan lingkungan hidup.²⁵ Penelitian ini juga mengidentifikasi 3 faktor keberhasilan pengembangan perikanan budidaya berbasis ekonomi biru. Faktor-faktor tersebut adalah pelestarian lingkungan, penerapan konsep ekonomi biru pada aktivitas budidaya, dan ketersediaan teknologi budidaya berbasis ekonomi biru. Secara keseluruhan, penelitian I Nyoman Rudiarta, dkk telah menganalisis dampak ekonomi biru secara detail dengan mengambil metode penelitian kuantitatif sehingga mampu menerjemahkan fenomena sosial dengan rasional. Namun, penelitian tersebut memiliki pembahasan yang terlalu lebar dan kurang spesifik dengan mengambil beberapa wilayah penelitian implementasi ekonomi biru.

Sedangkan, penelitian ini berada di posisi yang mengisi kesenjangan antara teori dan implementasi dengan cara menggabungkan teori fungsionalisme dan konsep-konsep ekonomi biru. Menggunakan studi kasus *The Lombok Blue Economy Implementation Program* yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, penelitian ini menganalisis apakah kerja sama KKP RI-FAO tersebut sudah mengacu pada pemenuhan konsep ekonomi biru atau belum. Secara khusus, penelitian akan membahas bagaimana kerja sama yang dilakukan antara KKP RI-FAO memiliki dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terdapat dalam konsep ekonomi biru terhadap masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

²⁵ I Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi, "Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru dengan Pendekatan *Analytic Hierarchy Process* (AHP)", *Jurnal Sosek KP* Vol. 10 No. 1 (2015): hlm. 47-57.

1.5 Kerangka Pemikiran

Neo-Liberalisme merupakan salah satu varian dalam teori liberal Ilmu Hubungan Internasional. Berbeda dengan paradigma Liberalisme sebelumnya, Neo-Liberalisme lebih berfokus pada kehadiran institusi formal yang mampu memfasilitasi kerja sama internasional. Contohnya, dengan kehadiran *United Nations* (UN) dan *World Trade Organization* (WTO) yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan internasional secara spesifik, seperti di bidang perekonomian, perdagangan, dan perdamaian dunia.

Ada dua konsep utama yang menjadi fokus dalam paradigma Neo-Liberalisme, yaitu interdependensi dan stabilitas hegemoni. Istilah saling ketergantungan (*interdependence*) yang ada dalam liberalisme kemudian berkembang dan menjadi salah satu konsep utama dalam Neo-Liberalisme. Saling ketergantungan antar negara dapat terjadi apabila melibatkan hubungan dependensi antar negara yang memiliki kepentingan dan perilaku yang sama. Dengan adanya konsep ini, negara dan aktor yang terlibat dalam kerja sama dapat sama-sama meraih keuntungan. Negara pun dinilai berhasil menjalankan kerja sama apabila kepentingan nasional dan kepentingan bersama dapat tercapai.

Salah satu teori dalam Neo-Liberalisme yang berbicara mengenai pemanfaatan kerja sama organisasi internasional dengan negara adalah teori fungsionalisme yang dicetuskan oleh David Mitrany. Dimulai dengan gagasan akan kerja sama internasional yang dielaborasi oleh L. T. Hobhouse, L. Woolf, dan G. D. H. Cole sehingga menginspirasi David Mitrany untuk mengkaji lebih lanjut

tentang kerja sama internasional negara dengan organisasi internasional.²⁶ Teori fungsionalisme merupakan salah satu pendekatan dalam Ilmu Hubungan Internasional yang muncul sejak abad pertengahan dan melihat bahwa kerja sama antara negara dengan organisasi internasional itu diperlukan, karena negara belum tentu mampu untuk memenuhi sendiri kebutuhan warga negaranya. Teori ini juga merupakan sebuah alternatif dari sistem federal, namun tetap mengakui peran organisasi dalam dunia internasional.²⁷ Negara dengan kedaulatannya memiliki kewenangan untuk melakukan transfer fungsi dengan badan internasional, agar negara mampu mencapai kepentingan nasionalnya.²⁸

Kerja sama internasional dibutuhkan oleh semua negara sebagai prasyarat untuk mencapai pemerintahan dunia. Dengan adanya pemerintahan dan komunitas internasional yang baik, maka masalah global dapat terselesaikan pula dengan baik. Dalam argumennya, Mitrany juga menyebutkan bahwa pemberian sebagian kedaulatan ekonomi dari suatu negara ke agen eksekutif internasional dapat memudahkan negara mencapai tujuan jelas kepentingan nasionalnya. Mitrany pun menekankan bahwa negara berwenang untuk bekerja sama dengan entitas internasional manapun, apabila fungsi atau karakteristik entitas tersebut sesuai dengan kepentingan nasional negara. Teori fungsionalisme lebih banyak mengedepankan fungsi dari suatu organisasi internasional dan manfaatnya apabila bekerja sama dengan negara, serta tidak memerhatikan faktor geografis antar aktor

²⁶ Mihai Alexandrescu, "David Mitrany: From Federalism to Functionalism".

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

yang terlibat.²⁹ Hubungan antara negara dengan organisasi internasional dalam teori fungsionalisme adalah agen atau organisasi internasional merupakan atribut dari negara dan mampu melakukan proses ramifikasi yaitu pemindahan fungsi atau otoritas dari negara ke agen internasional. Proses ramifikasi ini dapat menimbulkan efek domino, yaitu satu hubungan kerja sama dapat mendorong kerja sama baru di bidang yang berbeda. Hal tersebut juga dapat menguntungkan untuk negara yang masih membutuhkan kerja sama dalam mencapai kepentingan nasional.

Agen internasional diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi negara dalam keterbatasannya memenuhi kebutuhan domestik, terutama dalam kebutuhan bidang ekonomi dan sosial. Masalah keamanan suatu negara tidak hanya terbatas pada isu-isu tradisional saja, tapi juga bagaimana negara sanggup memberikan sebagian kedaulatannya untuk agen internasional yang dipercayakan dan bekerja sama dalam mencapai kepentingan nasional negara. Kegagalan *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam mencapai perdamaian dunia membuat teori ini melihat kerja sama internasional dari sudut pandang yang berbeda. Apabila LBB dipandang sebagai sistem yang federal, maka hal tersebut tidak akan berhasil karena kerja sama internasional diyakini baru dapat berhasil apabila kerja sama tersebut menyangkut kesejahteraan masyarakat. Interdependensi yang tercantum dalam Neo-Liberalisme juga menjadi poin dalam teori fungsionalisme David Mitrany, namun ia lebih mengarah pada interdependensi di tingkat ekonomi dan teknis

²⁹ Mihai Alexandrescu, "David Mitrany: From Federalism to Functionalism", *Transylvanian Review* XVI. 20-33: 2007, hlm. 25.

sehingga pemanfaatan fungsi organisasi internasional yang bekerja sama dengan negara dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

John McCormick kemudian membedakan empat prinsip fundamental dari teori fungsionalisme David Mitrany dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Prinsip Fundamental Teori Fungsionalisme

	Fungsionalisme
Tujuan dominan dari aktor terlibat	Perdamaian dan kesejahteraan.
Instrumen kebijakan negara	Instrumen ekonomi dan tindakan politik.
Pendorong pembuatan agenda	Menekankan pada <i>low politics</i> , seperti isu ekonomi dan sosial.
Peran organisasi internasional	Substansial; organisasi internasional yang fungsional dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan bertanggung jawab atas implementasinya.

Sumber: *International Organization Cambridge Journals*³⁰

Prinsip pertama, tujuan dominan dari aktor terlibat dalam teori fungsionalisme menjelaskan apakah kerja sama yang melibatkan aktor-aktor tertentu telah mengarah pada tujuan perdamaian dan kesejahteraan. Hal tersebut disebabkan karena teori fungsionalisme berfokus pada kepentingan dan kebutuhan yang sama antar aktor dalam mencapai integrasi global.³¹ Berbeda dari pandangan realisme yang melihat bahwa kerja sama antara negara baru dapat dilakukan apabila

³⁰ Peter Wolf, "International Organization and Attitude Change: A Re-Examination of the Functionalist Approach", *International Organization Cambridge Journals* 27 (3): 1973, 347-371.

³¹ N.D. Arora, *Political Science for Civil Services Main Examination*, (New Delhi: McGraw-Hill Education, 2010).

dengan tujuan keamanan militer, keseluruhan tujuan kerja sama menurut teori fungsionalisme demi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip kedua adalah instrumen kebijakan negara. Dalam mewujudkan tujuan kerja sama yang tercantum dalam prinsip pertama, maka negara perlu melakukan penerapan melalui kebijakannya.³² Prinsip ini berbicara tentang kebijakan apa saja yang mendasari negara dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain. Prinsip ini hanya dipenuhi oleh aktor negara, karena negara dianggap memiliki kewenangan khusus dalam menggunakan instrumen atau tindakan politik tertentu yang dianggap sesuai dalam mendukung agenda kerja sama.

Prinsip ketiga adalah mengenai pendorong pembuatan agenda kerja sama. Prinsip ini berisi latar belakang yang menyebabkan kerja sama itu bisa terjadi dan apa saja kepentingan dari kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama. Teori fungsionalisme memandang kerja sama itu dapat terjadi karena ada agenda *low politics* bagi negara.³³ Isu-isu seperti ekonomi dan sosial menjadi dorongan untuk bekerja sama dengan aktor lain, seperti organisasi internasional.

Terakhir, prinsip keempat dalam teori fungsionalisme adalah mengenai peran organisasi internasional. Dalam teori fungsionalisme, organisasi internasional memiliki peran yang substansial.³⁴ Substansial berarti organisasi internasional tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk negara. Rekomendasi yang diberikan oleh organisasi internasional dapat menjadi acuan

³² N.D. Arora, *Political Science for Civil Services Main Examination*.

³³ Ibid.

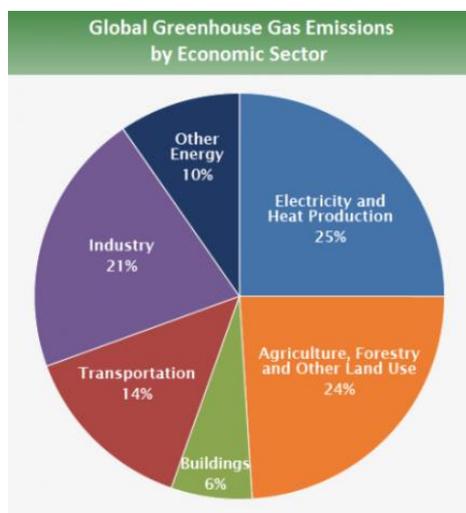
³⁴ Ibid.

negara dalam menentukan kebijakan selanjutnya, yang akan berpengaruh pada kesejahteraan dan kondisi rakyat.³⁵ Selain itu, organisasi internasional yang terlibat juga mampu bertanggung jawab atas penerapan rekomendasi yang telah diberikan kepada negara. Keempat prinsip fundamental dalam teori fungsionalisme tersebut menjadi dasar analisis skripsi ini dalam menganalisis perihal kerja sama KKP RI dengan FAO, apakah kerja sama tersebut sudah memenuhi keempat prinsip tersebut atau belum akan dibahas pada bab selanjutnya.

Selain menggunakan teori fungsionalisme David Mitrany, penelitian ini juga menggunakan konsep ekonomi biru dari Gunter Pauli. Aktivitas ekonomi yang selama ini dianggap menghasilkan banyak sisa pembuangan dan limbah, memiliki dampak buruk bagi sektor lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketergantungan manusia pada konsumsi di sektor agrikultur, perhutanan, dan penggunaan tanah menyumbang emisi gas kedua terbesar dalam polusi dunia sebanyak 24% setelah penggunaan energi listrik dan produksi panas, berdasarkan data dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Apabila tidak ditangani secara lebih profesional, lingkungan beserta sumber daya alamnya tidak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

³⁵ N.D. Arora, *Political Science for Civil Services Main Examination*.

Grafik 1.1. Total Emisi Gas Kaca Global berdasarkan Sektor Ekonomi 2014



Sumber: *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, 2014³⁶

Selama ini, masyarakat internasional lebih banyak bergantung pada sektor ekonomi hijau seperti perkebunan, pertanian, peternakan, dan perhutanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumsi manusia saat ini juga memang lebih banyak mengandalkan sektor agrikultur daripada sektor maritim. Padahal, mayoritas sebanyak 71% bagian Bumi terdiri dari lautan daripada daratan. Hal ini memperlihatkan bahwa manusia masih terlalu banyak bergantung pada sektor pemanfaatan ekonomi daratan daripada potensi maritim yang dimiliki.

Bertolak dari pemikiran tersebut, Gunter Pauli, seorang wirausahawan, penulis, dan inisiator konsep ekonomi biru dari Belgia, meyakinkan masyarakat internasional bahwa sektor ekonomi tidak selalu harus diikuti dengan kerusakan lingkungan. Sumber daya alam yang tersedia secara gratis dapat menghasilkan

³⁶ Global Greenhouse Gas Emissions Data 2014, <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data>.

manfaat bagi masyarakat apabila kita mengetahui bagaimana karakteristik dan pengelolaannya dengan benar. Pada tahun 2010, Pauli meluncurkan buku *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Melalui buku tersebut, Gunter Pauli menceritakan pemanfaatan laut dengan baik dapat menghasilkan lapangan kerja, inovasi teknologi, namun tetap menjunjung keadaan laut yang berkelanjutan sehingga tetap dapat dinikmati oleh generasi penerus.

Istilah konsep ekonomi biru itu sendiri mulai dikenal secara global pada *Rio+20 Earth Summit* tahun 2012 oleh *United Nations Environmental Programme* (UNEP), dan konsep tersebut mulai dipergunakan oleh negara-negara, khususnya negara kepulauan, untuk menjadi basis pembuatan kebijakan di bidang ekonomi domestik. Ekonomi biru itu sendiri berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa pengurangan agregat modal sumber daya alam dan menghubungkannya dengan perluasan lapangan kerja dan pelestarian lingkungan.³⁷ Dalam pertemuan tersebut, ditetapkan pula beberapa diskursus dalam konsep ekonomi biru, yaitu:

- a) laut sebagai modal sumber daya alam.
- b) laut sebagai ‘bisnis yang baik’.
- c) laut sebagai bagian integral dari Negara Berkembang Kepulauan Kecil (*Small Island Developing States/SIDS*).
- d) laut sebagai sumber mata pencaharian nelayan kecil.³⁸

³⁷ United Nations Environment Programme (UNEP), “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers,” 2011, diakses Desember 7, 2017, www.unep.org/greeneconomy; A. Bowen dan C. Hepburn, “Green Growth: An Assessment,” *Oxford Review of Economic Policy* 30 (3): 2014, 407–22; Sjak Smulders, Michael Toman, dan Cees Withagen, “Growth Theory and ‘Green Growth,’” *Oxford Review of Economic Policy* 30 (3): 2014, 423–46.

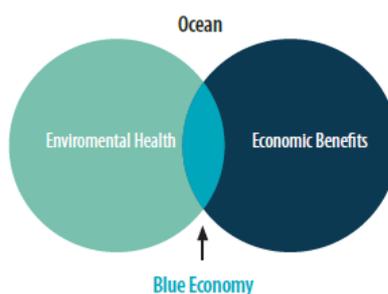
³⁸J. J. Silver, L. M. Campbell, L. W. Fairbanks, dan R. L. Gruby, 2015. “Blue Economy and Competing Discourses in International Oceans Governance,” *Journal of Environment & Development* 24 (2): 2015, 135–160.

Mengutip definisi dari *Economist Intellegence Unit 2015*, konsep ekonomi biru dapat diartikan sebagai berikut:

*A sustainable ocean economy emerges when economic activity is in balance with the long-term capacity of ocean ecosystems to support this activity and remain resilient and healthy.*³⁹

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi biru merupakan konsep yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi harus sejalan dengan pelestarian kesehatan lautan sehingga menciptakan kondisi laut yang berkelanjutan. Konsep ekonomi biru juga dapat dilihat pada Figur 1.1., ekonomi biru menjadi irisan antara kesehatan lingkungan dengan keuntungan ekonomi yang didapat. Negara harus menyadari bahwa populasi manusia dan kebutuhan pangan semakin meningkat, namun ketersediaan lahan semakin terbatas dapat menjadi ancaman tersendiri.

Figur 1.1. Konsep Ekonomi Biru



Sumber: *The World Bank*⁴⁰

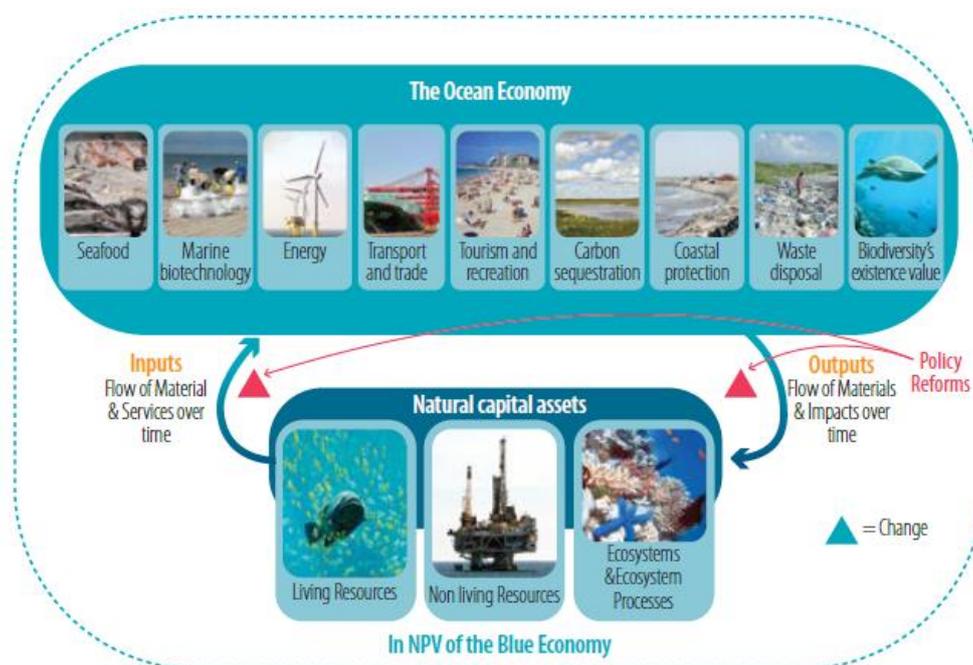
³⁹ Pawan G. Patil, John Virdin, Sylvia Michele Diez, Julian Roberts, Asha Singh, "Toward A Blue Economy: A Promise for Sustainable Growth in the Caribbean; An Overview", *The World Bank*, Washington D.C., 2016.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

Pentingnya pemahaman akan konsep ekonomi biru yang masih terbilang baru ini kemudian menarik perhatian FAO untuk ikut berkontribusi. Pada tahun 2014, FAO meluncurkan laporan berjudul *The State of World Fisheries and Aquaculture*. FAO pun mulai bergerak dengan penelitiannya untuk membuktikan kebutuhan masyarakat akan pangan di bidang maritim, pergeseran konsumsi hasil agraria menjadi produksi maritim dan bagaimana pengelolaan industri maritim saat ini masih sangat kurang. Masih banyak ditemukan nelayan menggunakan pukat harimau atau bom, dalam menangkap ikan sehingga hal tersebut berdampak buruk bagi kesehatan laut dan keberlanjutan lingkungan. Melalui laporan tersebut, FAO menekankan pentingnya peran pemberdayaan akuakultur dan perikanan dalam rangka mengurangi angka kelaparan, mempromosikan kesehatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Perubahan kebijakan dari sektor agrarikultur menjadi sektor maritim memerlukan kerangka konsep yang harus dipegang oleh negara. Menurut laporan dari *World Bank*, kerangka konsep ekonomi biru yang dapat dijadikan acuan perubahan kebijakan dapat dilihat dengan alur di bawah ini.

Figur 1.2. Kerangka Konsep Ekonomi Biru



Sumber: *The World Bank*⁴¹

Berdasarkan alur kebijakan konsep ekonomi biru yang diusulkan oleh *World Bank*, konsep ekonomi biru itu menekankan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh laut. Sebetulnya, laut itu sendiri menyimpan banyak modal alam yang apabila dimanfaatkan secara bertanggung jawab dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Modal alam yang dimiliki oleh laut, seperti makhluk hidup, sumber daya tidak hidup, proses ekosistem, menjadi input untuk kemudian dikonversikan dalam berbagai sektor maritim yang bermanfaat. Sektor maritim tersebut bisa berupa makanan laut, bio-teknologi laut, energi, transportasi dan perdagangan, pariwisata dan rekreasi, penyerapan karbon, perlindungan pesisir, pengaturan limbah, dan nilai eksistensi biodiversitas. Hasil dari sektor maritim

⁴¹ Pawan G. Patil, John Virdin, Sylvia Michele Diez, Julian Roberts, Asha Singh, "Toward A Blue Economy: A Promise for Sustainable Growth in the Caribbean; An Overview", hlm. 45.

tersebut yang digunakan secara berkelanjutan akan menghasilkan output berupa aliran bahan dan dampak dari waktu ke waktu. Kemudian, dimana peran pemerintah dalam reformasi kebijakan tersebut? Pemerintah memiliki kewenangan dalam reformasi kebijakan pada perubahan input dan output yang sesuai dengan alur. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dapat mengubah pemanfaatan modal alam dan membaginya menjadi beberapa sektor maritim bermanfaat, dilanjutkan dengan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan sehingga pemanfaatan sektor maritim tersebut menghasilkan nol limbah dan tidak merusak pemeliharaan laut. Akhirnya, output dapat didaur ulang dan tetap menghasilkan modal alam seperti sedia kala.

Figur 1.3. Matriks Penggunaan Teori Fungsionalisme dan Konsep Ekonomi Biru dalam Menganalisis Kerja Sama KKP RI-FAO



Sumber: Penulis

Secara keseluruhan, penelitian ini menggabungkan penggunaan teori fungsionalisme dan konsep ekonomi biru yang kemudian digambarkan dalam bentuk Figur 1.3. Konsep ekonomi biru yang sedang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pun menunjukkan bahwa adanya pertimbangan konkrit terkait pengelolaan sumber daya alam. Indonesia ingin membangkitkan kembali industri maritimnya karena melihat produksi dan konsumsi pangan dalam negeri terlalu bergantung pada hasil daratan selama ini. Apabila hanya bergantung pada satu

sumber daya alam saja, maka alam menjadi tidak stabil dan cenderung dieksploitasi. Sedangkan, konsep ekonomi biru yang dicanangkan oleh Gunter Pauli merupakan suatu alternatif yang dapat mendukung proyek implementasi yang sedang dilakukan Indonesia dengan FAO. Didukung oleh faktor geografis Indonesia dan bentuk negara Indonesia yang berupa negara kepulauan bisa menjadi kekuatan utama bagi Indonesia dalam merintis penerapan konsep ekonomi biru di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif akan berupa penelitian riset yang cenderung deskriptif dan analisis menggunakan landasan teori. Metode kualitatif juga akan menggali lebih dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan mencari informasi terbuka. Dalam penelitian, metode kualitatif berfokus pada pemahaman akan kompleksitas suatu permasalahan. Data kualitatif dapat berupa dokumen pribadi maupun umum, foto, dan laporan yang mampu menjelaskan penelitian tersebut. Validitas data ditentukan melalui prosedur validitas yang dilakukan oleh peneliti, peserta, ataupun pembaca.⁴² Dalam metode kualitatif, ada lima pendekatan penelitian, yaitu penelitian naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.⁴³

⁴² John W. Creswell, *Mixed Method Research*, (California: Sage Publications, 2007), hlm. 29.

⁴³ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 2nd edition, (California: Sage Publications, 2007), hlm. 78.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus berfokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam atas satu atau beberapa kasus dengan sistem yang dibatasi oleh konteks tertentu.⁴⁴ Unit analisis dalam penelitian ini adalah program kerja sama antara KKP-FAO melalui *The Lombok Blue Economy Implementation Program* yang juga menjadi studi kasus penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan tipe studi kasus instrumen tunggal (*single instrumental case study*). Penelitian hanya menggunakan satu kasus saja yang akan diteliti secara mendalam. Penulis menganalisis data berdasarkan deskripsi kasus kerja sama KKP-FAO tersebut dengan menggunakan data, seperti dokumen dan wawancara. Kemudian, dari data-data tersebut akan dianalisis secara holistik yang melihat secara keseluruhan program kerja sama KKP-FAO terkait implementasi kebijakan ekonomi biru. Lalu, ditutup dengan kesimpulan yang menjadi jawaban atas kasus yang diteliti.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari observasi, wawancara, studi dokumen, dan bahan audio-visual.⁴⁵ Teknik observasi dilakukan oleh peneliti yang mengambil data lapangan mengenai perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian secara langsung.⁴⁶ Kemudian, teknik wawancara dalam metode kualitatif melibatkan pertanyaan-pertanyaan tidak

⁴⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 2nd edition, hlm. 78.

⁴⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2009), hlm. 179-180.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

terstruktur dengan jenis pertanyaan terbuka kepada narasumber.⁴⁷ Lalu, studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen publik, seperti koran, laporan resmi, atau dokumen privat, seperti jurnal pribadi, surat elektronik, dan surat.⁴⁸ Sedangkan, bahan audio-visual yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif merupakan data-data dengan bentuk seperti foto, objek seni, video, atau suara.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif, yaitu teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Wawancara dilakukan oleh Penulis dengan jenis wawancara terbuka (*in-depth interview*) secara tatap muka dengan Dedi Adhuri, selaku peneliti *Marine Biodiversity* dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil wawancara tersebut menjadi data primer. Kemudian, teknik studi dokumen dalam penelitian ini didapat dari data pemerintah, laporan kajian FAO yang telah melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan warga Lombok Tengah dan Lombok Timur, laporan-laporan resmi dari KKP dan FAO, artikel, dan jurnal. Sumber jurnal didapat melalui perpustakaan kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Dalam Negeri, maupun jurnal spesifik yang menyangkut industri perikanan, seperti Jurnal Akuakultur. Selain itu, data sekunder juga menggunakan berita-berita yang berhubungan dengan topik ekonomi biru dan implementasi program tersebut. Berita didapat melalui laman web resmi seperti: portal berita

⁴⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2009), hlm. 179-180.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, FAO, atau media cetak Kompas, Detik, Gatra, Neraca, dan media lainnya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Alur pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. **BAB I** merupakan **pendahuluan** sebagai pengantar penelitian. **BAB II** berisi tentang penjelasan aktor yang terkait, yaitu **profil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesiadan *Food and Agricultural Organizations* (FAO)**, serta **bagaimana relasi antar kedua aktor**. Sedangkan, **Bab III** berisi **analisis penjelasan kerja sama antara KKP dengan FAO apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam teori fungsionalisme David Mitrany dan bagaimana kesesuaiannya terhadap prinsip ekonomi biru Gunter Pauli dipandang dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial**. Kemudian, penelitian ini akan ditutup dengan **BAB IV** sebagai **kesimpulan** yang akan memaparkan kembali mengenai **kerja sama KKP dan FAO melalui proyek *The Lombok Blue Economy Implementation Program di Lombok*** sebagai implementasi program kebijakan ekonomi biru di Indonesia. Kesimpulan tersebut akan berisi jawaban atas pertanyaan rumusan masalah penelitian ini.